



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
PULAU PUNJUNG 2021**



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Dharmasraya Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil, rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan/atau Tambahan Penghasilan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai.
10. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Verifikator adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat daerah yang bertugas melakukan Verifikasi terhadap Sasaran Kerja Pegawai secara Online.
15. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
17. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang Pegawai ASN dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan.
18. Disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

21. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
23. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi dan atau memiliki keahlian khusus yang sangat sedikit dimiliki di pemerintah daerah.
24. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang dimanakan oleh peraturan perundang-undangan.
25. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
26. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang harus dicapai setiap Tahun.
28. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja Pegawai ASN.
29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

31. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
32. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
33. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
34. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
35. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
36. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
37. Apel adalah kewajiban kehadiran PEGAWAI ASN dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggungjawab.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
  - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
  - c. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;



- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;
  - f. meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan
  - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen).

### BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

#### Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PERSYARATAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Pemberian TPP diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. TPP bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah; dan
- c. TPP ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, nilai/harga jabatan, dengan memperhatikan indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/ capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI ASN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pemberian TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua  
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN  
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP, dengan mempergunakan rumus sebagai berikut:  
 $A \text{ TPPBK} = (40\% \times B \text{ TPP})$

Keterangan:

A TPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Ketiga  
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN  
Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
 $A \text{ TPPP} = (60\% \times B \text{ TPP})$

Keterangan:

A TPPP	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Keempat  
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN  
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kesulitan geografis tinggi;
  - b. Daerah terpencil;
- (3) Kesulitan geografis dan daerah terpencil yang dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
 $A TPPTB = (10\% \times B TPP)$

Keterangan:

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kelima  
 Tambahan Penghasilan Pegawai ASN  
 Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.

- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Kab} = (10\% * B \text{ TPP Kab})$$

Keterangan:

A TPPKK Kab	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten
B TPP Kab	=	Basic TPP Kabupaten

- (5) Jabatan yang mendapatkan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Bagian Keenam  
 Tambahan Penghasilan Pegawai ASN  
 Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP Berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah dan/ atau yang memiliki keahlian khusus, sangat sedikit yang memiliki keahliannya.
- (2) Jabatan yang mendapatkan TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 10% s/d 100% dari Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (KP \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
KP	=	Persentase Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Ketujuh  
Tambahkan Penghasilan Pegawai ASN  
Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Kedelapan  
Klasifikasi Pemberian TPP

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan dan nilai/harga jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan persetujuan dari hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, konsidi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif.

Bagian Kesembilan  
Pegawai ASN yang tidak mendapatkan  
Tambahkan Penghasilan Pegawai

Pasal 14

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
  - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
  - c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan disebabkan menjadi tersangka tindak pidana;

- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - e. tugas belajar;
  - f. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - g. sedang menjalani cuti Besar, cuti Tahunan, cuti karena alasan penting, atau cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
  - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP tidak diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon PPPK.
- (3) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa Pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

## BAB VI PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

### Pasal 15

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus:  
“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”.
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Pasal 16

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota terdiri dari unsur:
- a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
  - b. organisasi perangkat daerah, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
  - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. bagian hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
  - f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tim Pelaksanaan TPP dapat ditambahkan dari Unsur Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian dan OPD terkait.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VIII  
PENILAIAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu  
Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. IKU; dan/atau
  - c. IKI.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran berdasarkan hasil *finger/face print* pegawai.
- (6) Setiap Pegawai ASN selain wajib melakukan rekam kehadiran berdasarkan *finger/face print* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel pagi dan pada saat upacara.
- (7) Kewajiban untuk mengisi daftar hadir manual pada saat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pada surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah pada saat masuk kerja, apel pagi, upacara dan pada saat pulang kerja.

Bagian Kedua  
Produktivitas Kerja

Pasal 18

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Hasil Capaian Produktivitas}}{\text{Produktivitas Kerja}} \times \text{Besaran TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja}$
---

- (2) Pegawai ASN yang mencapai produktivitas kerja sebesar 6000 (enam ribu) poin atau lebih dalam 1 (satu) bulan berjalan, besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem *SKP Online* setiap hari paling lama 3 (tiga) hari pada bulan berjalan.
- (4) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretariat Daerah.
- (6) Ketentuan validasi sesuai dimaksud pada ayat (2) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan input melalui sistem *SKP Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan yang termaktub dalam Peraturan Bupati tentang Manajemen Kinerja.
- (2) Sistem pembayaran TPP selama masa peralihan Sistem *SKP Online/kondisi Pandemi Covid-19* dapat dilakukan secara manual.

### Bagian Ketiga

#### Disiplin Kerja

##### Pasal 20

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
  - a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk kerja;
  - d. tidak mengikuti apel pagi;
  - e. tidak mengikuti upacara;
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, apabila seorang Pegawai ASN yang cuti sakit atau cuti melahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan cuti melahirkan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dan upacara dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

### BAB IX

#### REKAM KEHADIRAN

##### Pasal 21

Rekam kehadiran dilakukan sebelum masuk kerja pukul 7.30 WIB dan pulang kerja 16.00 WIB (Hari Senin – Kamis) dan pukul 7.30 WIB - 16.30 WIB untuk hari Jum'at.

### Bagian Kesatu

#### Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, rekam wajah atau identitas lain PEGAWAI ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran diperhitungkan paling banyak sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen).

## Bagian Kedua Tugas Kedinasan

### Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam kerja yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan/atau pukul 19.00 WIB, kehadirannya dibuktikan dengan *finger/face print*.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB X  
PENGURANGAN TPP PEGAWAI ASN

Pasal 24

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>finger/face print</i>	1,5%

- b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>face print</i>	1,55 %

- c. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari jumlah TPP hari berkenaan, kecuali bagi Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan upacara dengan alasan yang sah.
- d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena menjalani cuti sakit atau cuti melahirkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP hari berkenaan.
- e. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, TPP dikurangi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah TPP harian berkenaan dengan ketentuan:
1. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sampai dengan 2 (dua) hari melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah.

2. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat.
- f. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah TPP hari berkeenaan paling lama 2 (dua) hari, dan tidak masuk hari berikutnya dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
  - g. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja di bulan berkeenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
  - h. Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan;
    2. Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan;
    4. Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Format pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat keterangan dan permohonan izin tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 25

- (1) TPP dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Dharmasraya pada Kegiatan Administrasi Keuangan, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

- (2) TPP paling banyak dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

## BAB XII

### PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Daftar rekapitulasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya paling lambat tanggal 5 dan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (4) Dalam hal pada tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekapitulasi penerimaan TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) TPP diberikan terhitung bulan Januari 2021.
- (2) Capaian Kinerja pada masa peralihan system SKP Online/ masa pandemi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

BAB XIII  
MEKANISME PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PEGAWAI ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan TPP dalam kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan dimaksud.
- (2) Berdasarkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN didasarkan pada penetapan Peraturan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan terjadi mutasi atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan yang baru.



- (3) Dalam hal nama jabatan dan kelas jabatan dalam unit kerja belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan terendah pada unit kerja tempat Pegawai ASN bertugas.

#### Pasal 31

- (1) TPP dibayarkan secara non tunai kepada setiap Pegawai berdasarkan kelas jabatan pegawai yang telah ditetapkan dan tingkat kehadiran pegawai, didukung dengan rekam kehadiran.
- (2) Bidang urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai, dan untuk lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh Bagian yang membidangi keuangan.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan pencairan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah secara langsung (LS) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

#### Pasal 32

- (1) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM-LS);
  - c. daftar perhitungan TPP pegawai;
  - d. daftar hadir manual untuk rekam kehadiran manual;
  - e. salinan rekam kehadiran dan penghitungan secara elektronik;
  - f. Petikan Surat Keputusan Pemutasian dan Perubahan Kelas Jabatan serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (apabila terdapat perubahan kelas jabatan);
  - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - h. Surat Permohonan Pemindahbukuan/Pendebetn pembayaran tambahan penghasilan ke rekening penerima.

- (2) Bukti pendukung SPP dan SPM atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan di OPD yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIV SKP ONLINE

### Pasal 33

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menginput SKP Online pada bulan Januari setiap awal tahun.
- (2) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP online dilakukan pada bulan berikutnya setiap awal bulan.
- (3) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP Online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. pegawai menyampaikan realisasi target kerja pegawai, tugas tambahan dan kreativitas serta perilaku kerja setiap tanggal pertama hari kerja bulan berikutnya setelah satu bulan kinerja;
  - b. atasan langsung/ pejabat penilai mengoreksi dan menilai usulan realisasi prestasi kerja pegawai setiap tanggal kedua hari kerja atau dapat dilakukan pada hari yang sama dengan penyampaian realisasi prestasi kerja;
  - c. hasil perbaikan terhadap koreksian usulan realisasi prestasi kerja disampaikan kepada atasan langsung/pejabat penilai pada tanggal ketiga hari kerja;
  - d. pegawai dapat menolak untuk memperbaiki laporan realisasi sesuai koreksi atasan langsung/pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengajukan banding kepada atasan pejabat penilai dan memberikan penjelasan pada tanggal ketiga hari kerja;

- e. atasan langsung menyampaikan laporan realisasi prestasi kerja hasil perbaikan pegawai kepada verifikator perangkat daerah pada tanggal keempat hari kerja;
- f. tim manajemen kinerja menerima laporan verifikasi penilaian kinerja pegawai yang telah dilakukan oleh bagian kepegawaian dimasing-masing Perangkat Daerah dan merekomendasikan hasil penilaian kinerja pegawai pada tanggal kelima dan keenam hari kerja; dan
- g. penyampaian laporan prestasi kerja untuk bulan desember dilakukan pada tanggal kesebelas hari kerja bulan desember dan dilanjutkan dengan penilaian berikutnya sesuai dengan standar dan ketentuan.

## BAB XV

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan SKP Online untuk diaktifkan kembali oleh masing-masing Perangkat Daerah, dengan berkoordinasi dengan BKPSDM dan Dinas Kominfo.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan mulai pada awal Januari Tahun 2021.

## BAB XVI

### PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh BKPSDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SKP Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 belum terpenuhi maka pembayaran Tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 60% produktivitas, disiplin 40% secara manual.

Pasal 37

Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap pegawai ASN yang melaksanakan pekerjaan di luar tugas dan fungsi serta bersifat lintas perangkat daerah, Tim Anggaran, Tim Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Pelaksanaan TPP, Tim Pendapatan Daerah, Insentif dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan tim lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan honorarium dan/atau insentif, dengan mempedomani Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 38

Bagi pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diberikan TPP terhitung mulai tahun yang berikutnya.

Pasal 39

TPP bagi pegawai ASN yang berasal dari Sekolah Kedinasan diberikan sesuai dengan pembayaran gaji oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 40

- (1) Pegawai ASN yang diperbantukan/diberikan tugas sebagai Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.

- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/diberikan tugas atau diangkat sebagai Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPNS) sampai dengan 31 Maret 2021 belum menyampaikan laporan, maka Pembayaran TPP PNS yang bersangkutan dapat ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Penundaan Pembayaran TPP terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang mempunyai permasalahan terkait Barang Milik Daerah, maka TPP tidak dibayarkan.
- (5) Data pegawai ASN yang belum mempunyai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
- (6) Bagi pegawai ASN mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban sampai kewajiban pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.

#### Pasal 42

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP pegawai ASN Pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 43

Pembayaran TPP untuk pengemudi pada Perangkat Daerah dibayarkan sesuai dengan hasil *finger/face print* pada Perangkat Daerah masing-masing.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 Februari 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS	TPP YANG DITERIMA PNS
1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	15	15.143.000
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	9.222.000
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	9.222.000
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	9.222.000
5	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	13	7.555.000
6	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	13	7.555.000
7	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	13	7.555.000
8	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
9	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
10	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
11	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SDA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
12	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
13	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.230.000
14	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
15	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
16	KEPALA BAGIAN HUMAS	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
17	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN TU PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	12	4.857.000
18	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DAN KOORDINASI PMD, PPKB, TRANSMIGRASI DAN CAPIL	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
19	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
20	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI KESEHATAN, SOSIAL DAN PPPA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
21	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
22	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN BUMD	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
23	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
24	KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBALIAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
25	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000



26	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
27	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
28	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
29	KEPALA SUBBAGIAN PEMERINTAHAN, ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN KOORDINASI TRANTIBUM LINMAS	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
30	KEPALA SUBBAGIAN APARATUR PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KOORDINASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
31	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI KOORDINASI UMAT BERAGAMA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
32	KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
33	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
34	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
35	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PERHUBUNGAN, KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
36	KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PUPR, PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
37	KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.554.000
38	KEPALA SUBBAGIAN LPSE	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.839.000
39	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.839.000
40	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
41	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
42	KEPALA SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
43	KEPALA SUBBAGIAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
44	KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN MEDIA MASSA	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
45	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
46	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
47	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
48	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
49	PENYULUH KEMASYARAKATAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
50	ANALIS PRODUK HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
51	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
52	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
53	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
54	ANALIS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
55	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000

56	ANALIS PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
57	BENDAHARA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
58	ANALIS KELEMBAGAAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
59	ANALIS JABATAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
60	ANALIS TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
61	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
62	ANALIS KINERJA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
63	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
64	PENYUSUN NASKAH RAPAT PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
64,1	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
65	ANALIS PERENCANAAN PROGRAM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
66	PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
67	PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
68	PENGELOLA URUSAN AGAMA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
69	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
70	PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
71	PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
72	PENGELOLA DATA STATISTIK	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
73	PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
74	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
75	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
76	PRANATA BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
77	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
78	PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
79	PENGELOLA KENDARAAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
80	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
81	PRANATA LIPUTAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
82	PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
83	PENGELOLA MEDIA CETAK	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
84	PRANATA ACARA	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
85	AJUDAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
85,1	SEKRETARIS	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
87	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
88	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
89	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000

90	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
91	PETUGAS PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
92	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN	SEKRETARIAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
93	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	9	2.662.000
94	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	8	2.433.000
95	JF PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	9	2.721.000
96	JF PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	8	2.404.000
97	JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	10	2.728.000
98	JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSIONAL	8	2.407.000
99	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
100	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	11	4.055.000
101	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	11	4.055.000
102	KEPALA BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	11	3.793.000
103	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	9	2.809.000
104	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	9	2.809.000
105	KEPALA SUBBAGIAN RAPAT, RISALAH DAN HUMAS	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	9	2.809.000
106	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	8	2.461.000
107	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGARAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	8	2.214.000
108	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI	8	2.214.000
109	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
110	BENDAHARA	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
111	ANALIS PRODUK HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
112	ANALIS MATERI SIDANG	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
113	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
114	PENYUSUN RISALAH	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
115	ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	7	1.872.000
116	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	6	1.638.000
117	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	6	1.638.000
118	PENGELOLA PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	6	1.638.000
119	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGANGGARAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	6	1.638.000
120	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	6	1.638.000

121	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	5	1.321.000
122	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	5	1.321.000
123	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	5	1.321.000
124	PETUGAS PROTOKOL	SEKRETARIAT DPRD	PELAKSANA	5	1.321.000
125	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	SEKRETARIAT DPRD	FUNGSIONAL	8	2.214.000
126	INSPEKTUR	INSPEKTORAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	8.160.000
127	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.890.000
128	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.861.000
129	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.861.000
130	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.861.000
131	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.861.000
132	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
133	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
134	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	INSPEKTORAT DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
135	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
136	BENDAHARA	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
137	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
138	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
139	PENGELOLA PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
140	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
141	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
142	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
143	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	INSPEKTORAT DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
144	JF AUDITOR AHLI MADYA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	11	3.745.000
145	JF AUDITOR AHLI MUDA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	9	2.662.000
146	JF AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	8	2.433.000
147	JF AUDITOR TERAMPIL PENYELIA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	8	2.338.000
148	JF AUDITOR TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	7	2.114.000
149	JF AUDITOR TERAMPIL PELAKSANA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	6	1.757.000
150	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	11	3.745.000
151	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	9	2.662.000

152	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	8	<b>2.433.000</b>
153	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>
154	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	12	<b>4.712.000</b>
155	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
156	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
157	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
158	KEPALA SUBBIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
159	KEPALA SUBBIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
160	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
161	KEPALA SUBBIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
162	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
163	KEPALA SUBBIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
164	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
165	BENDAHARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
166	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
167	ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
168	PENYUSUN RENCANA MUTASI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
169	ANALIS KINERJA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>

170	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
171	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
172	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
173	PENGELOLA DATABASE	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
174	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
175	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
176	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
177	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
179	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
180	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
181	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
182	JF ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FUNGSIONAL	9	<b>2.662.000</b>
183	JF ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>
184	JF ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL PENYELIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FUNGSIONAL	8	<b>2.338.000</b>
185	JF ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FUNGSIONAL	7	<b>2.114.000</b>
186	JF ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL PELAKSANA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FUNGSIONAL	6	<b>1.757.000</b>
187	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	<b>9.222.000</b>
188	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	12	<b>4.768.000</b>
189	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>4.275.000</b>
190	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
191	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.706.000</b>

192	KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.706.000
193	KEPALA BIDANG ANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	4.275.000
194	KEPALA BIDANG ASET	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	3.968.000
195	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
196	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
197	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN ASET	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
198	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
199	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
200	KEPALA SUBBIDANG BELANJA LANGSUNG	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.819.000
201	KEPALA SUBBIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.819.000
202	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI UMUM	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
203	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI PERANGKAT DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
204	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
205	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
206	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENDAPATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
207	KEPALA SUBBIDANG PBB DAN BPHTB	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
208	KEPALA SUBBIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
209	KEPALA SUBBIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
210	KEPALA SUBBIDANG KEBIJAKAN ANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.554.000
211	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.554.000
212	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN PPKD	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.839.000
213	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN ASET	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
214	KEPALA SUBBIDANG PENGHAPUSAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENILAIAN ASET	BADAN KEUANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
215	BENDAHARA	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
216	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
217	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
218	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
219	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAHAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
220	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
221	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
222	PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
223	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000

224	PENGOLAH DAFTAR GAJI	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
225	PENGELOLA GAJI	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
226	PENGELOLA AKUNTANSI	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
227	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
228	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
229	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
230	PENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
231	PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
232	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
233	PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
234	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
235	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
236	VERIFIKATOR ANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
237	PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
238	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000
239	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
240	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
241	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
242	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
243	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	1.321.000
244	JURU PUNGUT RETRIBUSI	BADAN KEUANGAN DAERAH	PELAKSANA	3	902.000
245	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BADAN KEUANGAN DAERAH	FUNGSIONAL	9	2.721.000
246	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	BADAN KEUANGAN DAERAH	FUNGSIONAL	8	2.404.000
247	KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
248	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
249	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
250	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
251	KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
252	BENDAHARA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
253	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
254	ANALIS MITIGASI BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
255	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
256	ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
257	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	6	1.638.000



258	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
259	PENGOLAH BAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
260	PRANATA BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
261	PENGADMINISTRASI UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
262	JF RESCUE TERAMPIL PENYELIA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FUNGSIONAL	9	<b>3.045.000</b>
264	JF RESCUE MAHIR	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FUNGSIONAL	8	<b>2.423.000</b>
264	JF RESCUE TERAMPIL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FUNGSIONAL	8	<b>2.423.000</b>
265	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	<b>8.160.000</b>
266	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	12	<b>4.768.000</b>
267	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
268	KEPALA BIDANG EKONOMI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
269	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
270	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	11	<b>3.706.000</b>
271	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
273	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
274	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
275	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
276	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
277	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
278	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
279	KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN UMUM	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
280	KEPALA SUBBIDANG BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>

281	KEPALA SUBBIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PARIWISATA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
282	KEPALA SUBBIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
283	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
284	KEPALA SUBBIDANG DATA DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
285	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
286	KEPALA SUBBIDANG MONITORING DAN EVALUASI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
287	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
288	BENDAHARA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
289	ANALIS BUDAYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
290	ANALIS KEMASYARAKATAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
291	ANALIS SOSIAL BUDAYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
292	ANALIS KOPERASI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
293	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
294	PENYUSUN RENCANA SARANA PENGEMBANGAN USAHA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
295	ANALIS INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
296	PENELAAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
297	PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000
298	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	1.872.000

299	ANALIS DATA DAN INFORMASI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
300	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
301	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
302	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
303	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
304	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
305	PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
306	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
307	PENGELOLA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN BADAN USAHA DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
308	PENGELOLA GEOSPASIAL	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
309	PENGOLAH DATA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
310	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
311	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
312	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
313	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
314	JF PERENCANA AHLI MUDA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	FUNGSIONAL	9	<b>2.662.000</b>
315	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>
316	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>

317	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	12	4.712.000
318	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
319	KEPALA BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
320	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	11	3.968.000
321	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
322	KEPALA SEKSI LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
323	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
324	KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
325	KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
326	KEPALA SEKSI KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
327	KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
328	KEPALA SEKSI PEMBINAAN USAHA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
329	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
330	KEPALA SEKSI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
331	KEPALA SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
332	BENDAHARA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	1.872.000
333	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	1.872.000
334	ANALIS PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	1.872.000

335	PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
336	ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
337	PENGAWAS KEPARIWISATAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
338	ANALIS OBJEK WISATA PADA BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
339	ANALIS KEPEMUDAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
340	PENGAWAS OLAH RAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
341	ANALIS KEOLAHRAGAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
342	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
343	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
344	PENGELOLA DATA SEJARAH	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
345	PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
346	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
347	PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
348	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
349	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
350	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
351	PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
352	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>

353	JURU PELESTARI CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PELAKSANA	3	902.000
354	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
355	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	12	4.712.000
356	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	11	3.706.000
357	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	11	3.706.000
358	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	11	3.706.000
359	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	9	2.809.000
360	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.461.000
361	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
362	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.461.000
363	KEPALA SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
364	KEPALA SEKSI KELAHIRAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
365	KEPALA SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
366	KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
367	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.461.000
368	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.461.000
369	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI	8	2.214.000
370	BENDAHARA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	7	1.872.000

371	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
372	PEMERIKSA KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
373	PENGAWAS KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
374	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
375	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
376	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
377	PENGELOLA MUTASI PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
378	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
379	PENGOLAH DATA PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
380	PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
381	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
382	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
383	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
384	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
385	PENGADMINISTRASI PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERNIKAHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
386	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
386,1	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
387	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>
388	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	12	<b>4.712.000</b>

389	DIREKTUR PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
390	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	11	3.793.000
391	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	11	3.793.000
392	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	11	3.793.000
393	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
394	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
395	KEPALA UPTD INSTALASI GUDANG FARMASI	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
396	KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
397	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
398	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
399	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
400	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
401	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
402	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
403	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
404	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
405	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
406	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD INSTALASI GUDANG FARMASI	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
407	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
408	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
409	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
410	KEPALA SUBBAGIAN ASET DAN RUMAH TANGGA	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
411	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
412	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
413	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	7	1.872.000
414	BENDAHARA	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	7	1.872.000
414,1	BENDAHARA PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	7	1.872.000
415	PEMERIKSA SANITASI	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	7	1.872.000
416	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	7	1.872.000
417	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000



418	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
419	PENGELOLA PROGRAM GIZI	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
420	PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
421	PENGELOLA PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
422	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
423	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
424	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
424,1	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
424,2	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
425	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
426	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
427	PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
428	PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
429	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
430	PRANATA JAMUAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
431	PENGOLAH MAKANAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	6	1.638.000
432	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
432,1	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
433	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
433,1	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
434	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
434,1	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
435	PENGADMINISTRASI UMUM PADA UPTD INSTALASI GUDANG FARMASI KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
435,1	PENGADMINISTRASI UMUM PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
435,2	PENGADMINISTRASI UMUM PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
435,3	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
436	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KELAS D	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000

437	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	5	1.321.000
438	PENGEMUDI AMBULAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	4	941.000
439	PENGEMUDI	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
439,1	PENGEMUDI PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
440	PETUGAS KEAMANAN PADA UPTD INSTALASI GUDANG FARMASI KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
440,1	PETUGAS KEAMANAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
440,2	PETUGAS KEAMANAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
440,3	PETUGAS KEAMANAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	3	902.000
441	PRAMU KEBERSIHAN PADA UPTD INSTALASI GUDANG FARMASI KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	1	733.000
442	PRAMU BAKTI	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	1	733.000
442,1	PRAMU KEBERSIHAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	1	733.000
442,2	PRAMU KEBERSIHAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	1	733.000
442,3	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KESEHATAN	PELAKSANA	1	733.000
443	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
444	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.662.000
445	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
446	JF APOTEKER AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.774.000
447	JF APOTEKER AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.692.000
448	JF APOTEKER AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.461.000
449	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.366.000
450	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.146.000
451	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.793.000
452	JF BIDAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
453	JF BIDAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.662.000
454	JF BIDAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
455	JF BIDAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
456	JF BIDAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
457	JF BIDAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
458	JF PERAWAT AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.803.000
459	JF PERAWAT AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.721.000
460	JF PERAWAT AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.490.000

461	JF PERAWAT TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
462	JF PERAWAT TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
463	JF PERAWAT TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
464	JF DOKTER AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	12	4.957.000
465	JF DOKTER AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	10	3.323.000
466	JF DOKTER AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.085.000
467	JF DOKTER GIGI AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	12	4.957.000
468	JF DOKTER GIGI AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	10	3.226.000
469	JF DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.692.000
470	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
471	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.055.000
472	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
473	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
474	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
475	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
476	JF ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
477	JF ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.055.000
478	JF ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
479	JF ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
480	JF ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
481	JF ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
482	JF NUTRISIONIS AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
483	JF NUTRISIONIS AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.055.000
484	JF NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
485	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
486	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
487	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
488	JF PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.939.000
489	JF PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.721.000
490	JF PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.490.000
491	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
492	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
493	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
494	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
495	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.662.000
496	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
497	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000

498	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
499	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
500	JF SANITARIAN AHLI MADYA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
501	JF SANITARIAN AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.692.000
502	JF SANITARIAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.461.000
503	JF SANITARIAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.366.000
504	JF SANITARIAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.146.000
505	JF SANITARIAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.793.000
506	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
507	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
508	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
509	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
510	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
511	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
512	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
513	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
514	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
516	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	1.872.000
518	JF RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.214.000
519	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.662.000
520	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
521	JF ARSIPARIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
522	JF ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
523	JF ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
524	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
525	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	11	3.842.000
526	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
527	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
528	KEPALA BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
529	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
530	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
531	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
532	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
533	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000

534	KEPALA SEKSI TATAKELOLA PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
535	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
536	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
537	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
538	KEPALA SEKSI INFORMASI DATA STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
539	BENDAHARA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
540	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
541	ANALIS BERITA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
542	ANALIS SISTEM INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
543	ANALIS PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
544	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	7	1.872.000
545	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
546	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
547	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
548	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
549	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
550	PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
551	PRANATA ALAT PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
552	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
553	PENGUKUR DAN PENGALIH REKAM MATERI PENYENSORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
554	PENGOLAH DATA PROSES PENYENSORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
555	PENGOLAH DATA HASIL PENYENSORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
556	PENGELOLA DATABASE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
557	OPERATOR KOMUNIKASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
558	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
559	PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	6	1.638.000
561	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	5	1.321.000
562	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	5	1.321.000
563	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	5	1.321.000
564	TEKNISI JARINGAN INSTALASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PELAKSANA	5	1.321.000
565	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
566	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
567	JF PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
567,1	JF PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
568	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	8	2.214.000
569	JF SANDIMAN AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
570	JF SANDIMAN AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	8	2.433.000

571	JF STATISTISI AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
572	JF STATISTISI AHLI PERTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
573	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
574	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
575	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
576	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
577	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
578	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
579	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
580	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
581	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
582	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
583	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
584	KEPALA SEKSI KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
585	KEPALA SEKSI STABILISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
586	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
587	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
588	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
589	BENDAHARA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	1.872.000

590	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
591	ANALIS KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
592	PENYULUH KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
593	ANALIS BIMBINGAN USAHA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
594	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
595	FASILITATOR PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
596	PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
597	PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DAN PEMASARAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
598	ANALIS PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
599	ANALIS INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
600	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
601	PEMERIKSA INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
602	PENGAWAS INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
603	ANALIS KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
604	ANALIS MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
605	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
606	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
607	PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>

608	PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
609	PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
610	PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
611	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
612	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
613	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
614	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	9	<b>2.721.000</b>
615	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.490.000</b>
616	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.395.000</b>
617	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	7	<b>2.178.000</b>
618	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	6	<b>1.828.000</b>
619	JF PENERA AHLI MUDA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	9	<b>3.055.000</b>
620	JF PENERA AHLI PERTAMA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>
621	JF PENERA TERAMPIL PENYELIA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.338.000</b>
622	JF PENERA TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	7	<b>2.114.000</b>
623	JF PENERA TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	6	<b>1.757.000</b>
624	JF PENGAWAS METROLOGI LEGAL AHLI MUDA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	9	<b>2.662.000</b>
625	JF PENGAWAS METROLOGI LEGAL AHLI PERTAMA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>



626	JF PENGAMAT TERA TERAMPIL PENYELIA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.338.000</b>
627	JF PENGAMAT TERA TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	7	<b>2.114.000</b>
628	JF PENGAMAT TERA TERAMPIL PELAKSANA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	6	<b>1.757.000</b>
629	JF PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI MUDA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	9	<b>2.662.000</b>
630	JF PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>
631	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>
632	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	12	<b>4.712.000</b>
633	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENTAATAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
634	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN PERTAMANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	11	<b>3.706.000</b>
635	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
636	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
637	KEPALA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
638	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
639	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
640	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
641	KEPALA SEKSI PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
642	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
643	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERTAMANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
644	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
645	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
646	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
647	BENDAHARA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
648	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
649	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>

650	PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	1.872.000
651	ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	1.872.000
652	ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	7	1.872.000
653	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
654	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
655	PENGELOLA GEOSPASIAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
656	PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
657	PENGELOLA LIMBAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
658	PENGELOLA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
658,1	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
658,2	PENGELOLA LIMBAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
659	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
660	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
661	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
662	PENGELOLA LABORATORIUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
663	TEKNISI LABORATORIUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	6	1.638.000
664	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	5	1.321.000
665	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PELAKSANA	5	1.321.000
666	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL	9	2.662.000
667	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL	8	2.433.000
668	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL	9	2.721.000
669	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL	8	2.490.000
670	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
671	SEKRETARIS DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
672	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
673	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
674	KEPALA BIDANG PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
675	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
676	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
677	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
678	KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
679	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
680	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
681	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
682	KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000

683	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
684	KEPALA SEKSI BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
685	KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN PASCA PANEN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
686	KEPALA SEKSI PERAIRAN UMUM	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
687	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI BENIH IKAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
689	BENDAHARA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
690	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
691	PENGAWAS HARGA PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
692	ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
693	ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
694	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
695	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
696	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
697	ANALIS BENIH	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	7	1.872.000
698	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
699	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
700	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
701	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
702	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
703	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
704	PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
705	PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
706	PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
707	PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	6	1.638.000
708	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	5	1.321.000
709	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	5	1.321.000
710	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	5	1.321.000
711	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	5	1.321.000
713	JF PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI MUDA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
714	JF PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI PERTAMA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.461.000
715	JF PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.366.000
716	JF PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	7	2.146.000
717	JF PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	6	1.793.000
718	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000

719	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
720	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
721	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
722	JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
723	JF PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
724	JF PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
725	JF PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
726	JF PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
727	JF PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
728	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
729	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
730	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
731	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
732	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
733	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
734	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
735	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
736	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	12	4.712.000
737	KEPALA BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	11	3.706.000
738	KEPALA BIDANG PENGAIRAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	11	3.706.000
739	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	11	3.706.000
740	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG, BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	11	3.968.000
741	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	9	2.809.000
742	KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	9	2.809.000
743	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000

744	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
745	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
746	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN LEGER	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
747	KEPALA SEKSI SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
748	KEPALA SEKSI AIR BAKU DAN EMBUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
749	KEPALA SEKSI IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.214.000
750	KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
751	KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR BERSIH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
752	KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PJPU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
753	KEPALA SEKSI BINA TEKNIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
754	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
755	KEPALA UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
756	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.214.000
757	KEPALA UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI	8	2.461.000
758	BENDAHARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	7	1.872.000
759	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	7	1.872.000
760	PENGAWAS TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	7	1.872.000
761	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	7	1.872.000

762	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
763	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
764	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
765	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
766	PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
767	PRANATA DAERAH ALIRAN SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
768	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
769	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
770	PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
771	PRANATA TAMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
772	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
773	PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
774	PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
775	TEKNISI AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
776	OPERATOR ALAT BERAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	6	1.638.000
777	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	5	1.321.000
778	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	5	1.321.000
779	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	5	1.321.000

780	PENJAGA PINTU AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	3	902.000
781	JF TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	8	2.423.000
782	JF TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	7	2.209.000
783	JF TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	6	1.793.000
784	JF PEMBINA JASA KONTRUKSI AHLI PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	8	2.214.000
785	JF PENATA RUANG AHLI PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	8	2.214.000
786	JF TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	8	2.214.000
787	JF TEKNISI PENGAIRAN AHLI MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	9	2.750.000
788	JF TEKNISI PENGAIRAN AHLI PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL	8	2.518.000
789	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
790	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	12	4.712.000
791	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
792	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	11	3.968.000
793	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	11	3.706.000
794	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	11	3.968.000
795	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
796	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
797	KEPALA SEKSI PENDATAAN, PENGEMBANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	9	2.809.000

798	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
799	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
800	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
801	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
802	KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN ASET NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
803	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN PERANGKAT NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
804	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
805	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
806	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
807	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PANGAN DAN PEMASARAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
808	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
809	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
810	BENDAHARA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
811	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
812	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
813	ANALIS PRODUK HUKUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
814	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
815	PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>



816	ANALIS PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
817	PENYUSUN BAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
818	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
819	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
820	ANALIS KOMUNITAS ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
821	ANALIS NILAI BUDAYA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
822	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
823	PERANCANG BAHAN PARTISIPASI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
824	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
825	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
826	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
827	PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
828	FASILITATOR KELEMBAGAAN PEMASARAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
829	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
830	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
831	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
832	ANALIS PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
833	ANALIS KEMITRAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>

834	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
835	PENYUSUN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
836	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
837	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
838	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
839	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
839,1	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
840	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
841	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
842	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
843	PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
844	PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
845	PENGELOLA PARTISIPASI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
846	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
847	PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
848	PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
849	PENGELOLA TEKNIS SURVEI JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
850	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>

851	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
852	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
853	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
854	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
855	JF ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	<b>1.872.000</b>
856	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>
857	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	12	<b>4.712.000</b>
858	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
859	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	11	<b>3.968.000</b>
860	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	11	<b>3.706.000</b>
861	KEPALA BIDANG KEBIJAKAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN PELAYANAN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	11	<b>3.706.000</b>
862	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
863	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
864	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
865	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
866	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
867	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	<b>2.214.000</b>
868	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>

869	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN UMUM DAN LAINNYA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	2.214.000
870	KEPALA SEKSI KEBIJAKAN PENGADUAN DAN PENYULUHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	2.214.000
871	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI	8	2.214.000
872	BENDAHARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
873	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
874	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
875	ANALIS TATA PAMERAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
876	PENYUSUN BAHAN PRASARANA PENERAPAN STANDAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
877	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
878	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	7	1.872.000
879	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
880	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
881	PENGELOLA SIM PENANANAM MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
882	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
883	PENGELOLA DOKUMENTASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
883,1	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	6	1.638.000
884	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	5	1.321.000
885	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	5	1.321.000

886	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAKSANA	5	1.321.000
887	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
888	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
889	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
890	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
891	KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
892	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TATAUSAHA	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
893	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
894	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
895	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
896	KEPALA SUBBAGIAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
897	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
898	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
899	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
900	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
901	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
902	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
903	BENDAHARA	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
904	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
905	PENYUSUN KURIKULUM, MODUL DAN BAHAN AJAR	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
906	PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
907	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
908	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
909	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
910	ANALIS KOMPETENSI KELULUSAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000

911	ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
912	ANALIS PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	7	1.872.000
913	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
914	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
915	PENGELOLA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
917	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
918	PEMBINA KARAKTER	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
919	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
920	PENGELOLA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	6	1.638.000
923	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
924	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
925	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
926	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
927	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
928	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	5	1.321.000
929	PRAMU KEBERSIHAN PADA SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN	PELAKSANA	1	733.000
930	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	3.803.000
931	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	2.721.000
932	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	390.000
933	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	390.000
934	JF PENILIK AHLI MADYA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	3.745.000
935	JF PENILIK AHLI MUDA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	2.662.000
936	JF PENILIK AHLI PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	2.433.000
937	JF PAMONG BELAJAR AHLI MUDA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	2.662.000
938	JF PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	2.433.000
939	JF GURU AHLI MADYA KEPALA SEKOLAH SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	390.000
940	JF GURU AHLI MUDA KEPALA SEKOLAH SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	390.000
941	JF GURU AHLI PERTAMA KEPALA SEKOLAH SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	390.000
942	JF GURU AHLI MADYA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	325.000
943	JF GURU AHLI MUDA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	325.000
944	JF GURU AHLI PERTAMA SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	325.000
945	JF GURU GOLONGAN II SERTIFIKASI	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	325.000
946	JF GURU AHLI MADYA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	11	3.803.000
947	JF GURU AHLI MUDA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	9	2.721.000
948	JF GURU AHLI PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	2.433.000
949	JF GURU GOLONGAN II	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL GURU	8	2.214.000

950	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
951	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
952	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
953	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
954	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
955	KEPALA SEKSI LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
956	KEPALA SEKSI ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
957	KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
958	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
959	KEPALA SEKSI PENGUJIAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
960	KEPALA SEKSI PRASARANA	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
961	KEPALA SEKSI KESELAMATAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
962	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
963	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
964	BENDAHARA	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
965	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
966	ANALIS TEKNIK SURVEI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
967	ANALIS MANAJEMEN LANTAS	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
968	ANALIS ANGKUTAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
969	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
970	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
971	PENYURVEI PENANGANAN DAMPAK TRANSPORTASI DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	7	1.872.000
972	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
973	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
974	PENGELOLA TERMINAL	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
975	PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
976	TEKNISI SURVEI JARINGAN TRANSPORTASI	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
977	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	6	1.638.000
978	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	5	1.321.000
979	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	5	1.321.000
980	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	5	1.321.000
981	PENAGIH RETRIBUSI	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA	5	1.321.000
982	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL PENYELIA	DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSIONAL	8	2.395.000

983	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSIONAL	7	2.178.000
984	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSIONAL	6	1.828.000
985	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
986	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
987	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
988	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
989	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
990	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
991	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
992	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
993	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
994	KEPALA SEKSI LAYANAN, ALIH MEDIA DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
995	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
996	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
997	BENDAHARA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
998	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
999	PENGAWAS PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1000	PENYULUH PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1001	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1002	PENYULUH KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1003	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1004	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1005	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1006	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1007	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1008	PENGELOLA PENGAWASAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1009	PRANATA REPRODUKSI ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1010	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1011	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1012	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1013	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1014	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1015	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000



1016	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1017	JF ARSIPARIS TERAMPIL PENYELIA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
1018	JF ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
1019	JF ARSIPARIS TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
1020	JF PUSTAKAWAN AHLI MUDA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1021	JF PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1022	JF PUSTAKAWAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
1023	JF PUSTAKAWAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
1024	JF PUSTAKAWAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
1025	KEPALA DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
1026	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
1027	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1028	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1029	KEPALA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
1030	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1031	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1032	KEPALA BIDANG PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1033	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1034	KEPALA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1035	KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1036	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1037	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1038	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1039	KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1040	KEPALA SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1041	KEPALA SEKSI KETENAGAAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1042	KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1043	KEPALA UPTD PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1044	KEPALA UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1045	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1046	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1047	KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000

1048	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1049	KEPALA SEKSI PRODUKSI PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1050	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1051	KEPALA SEKSI PRODUKSI PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1052	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1053	KEPALA SEKSI PRODUKSI PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1054	KEPALA SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1055	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1056	KEPALA SEKSI METODE DAN INFORMASI	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1057	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1058	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1059	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	DINAS PERTANIAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1060	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1061	BENDAHARA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1062	ANALIS LAHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1063	PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1064	ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1065	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1065,1	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1065,2	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1066	ANALIS POTENSI PERBENIHAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1067	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PERBENIHAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1068	ANALIS PENGELOLAAN KOMODITAS PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1069	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1070	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1071	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000

1072	PENGAWAS SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1073	ANALIS KAPASITAS PENYULUH	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1074	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1075	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1076	PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1077	PENGELOLA ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1078	PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1079	PENGELOLA PRODUKSI PADA BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1080	PENGELOLA DATA PASCA PANEN PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1081	PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN ATAU PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1082	PENGELOLA DATA PASCA PANEN PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1083	PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1084	PENGELOLA PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1085	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1086	PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK DAN IZIN BUDIDAYA TERNAK	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1087	PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1088	PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1089	PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1090	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1091	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092	PENGELOLA PASAR	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,1	PENGELOLA ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,2	PENGELOLA ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,3	PENGELOLA PRODUKSI PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,4	PENGELOLA PRODUKSI PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,5	PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN PADA BIDANG HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1092,6	PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN PADA BIDANG PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1093	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1094	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1095	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	5	1.321.000

1096	PERAWAT TERNAK	DINAS PERTANIAN	PELAKSANA	3	902.000
1098	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	11	3.939.000
1099	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	2.721.000
1100	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.490.000
1101	JF PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL PENYELIA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.395.000
1102	JF PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	7	2.178.000
1103	JF PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	6	1.828.000
1104	JF PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL PELAKSANA PEMULA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	5	1.537.000
1105	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1106	JF MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1107	JF PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL PENYELIA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.338.000
1108	JF PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	7	2.114.000
1109	JF PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL PELAKSANA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	6	1.757.000
1110	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1111	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1113	JF PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1114	JF PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1115	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1116	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.214.000
1116	JF PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.214.000
1116	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	DINAS PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	2.214.000
1117	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
1118	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
1119	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1120	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000
1121	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1122	KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1123	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1124	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000

1125	KEPALA SEKSI PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1126	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1127	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1128	BENDAHARA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1129	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1130	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1131	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1132	ANALIS INFRASTRUKTUR	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1133	ANALIS PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1134	ANALIS PENDAFTARAN HAK TANAH DAN GUNA RUANG	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1135	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1136	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1137	PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1138	PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1139	PENGELOLA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1140	PENGELOLA ALAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1141	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1142	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	5	1.321.000

1143	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1144	JF TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.214.000</b>
1145	JF PENATA RUANG AHLI PERTAMA	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.214.000</b>
1146	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PIMPINAN TINGGI	14	<b>7.773.000</b>
1147	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	12	<b>4.712.000</b>
1148	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	11	<b>4.055.000</b>
1149	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	11	<b>3.793.000</b>
1150	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	11	<b>3.793.000</b>
1151	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	11	<b>4.055.000</b>
1152	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
1153	KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
1154	KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	9	<b>2.809.000</b>
1155	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>

1156	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1157	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1158	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1159	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1160	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1161	KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1162	KEPALA SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1163	KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK HAK ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1164	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1165	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1166	KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1167	BENDAHARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	1.872.000

1168	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1169	ANALIS MASALAH SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1170	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1171	PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1172	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1173	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1173,1	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1174	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1175	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1176	PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1177	PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1178	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>



1179	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1180	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1181	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1182	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1183	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1184	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1185	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1186	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1187	JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	FUNGSIONAL	9	<b>2.662.000</b>
1188	JF PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	FUNGSIONAL	8	<b>2.433.000</b>
1189	JF PEKERJA SOSIAL TERAMPIL PENYELIA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	FUNGSIONAL	8	<b>2.338.000</b>
1190	JF PEKERJA SOSIAL TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	FUNGSIONAL	7	<b>2.114.000</b>

1191	JF PEKERJA SOSIAL TERAMPIL PELAKSANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	FUNGSIONAL	6	1.757.000
1192	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
1193	SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	11	4.712.000
1194	KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1195	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1196	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1197	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1198	KEPALA SEKSI PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1199	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1200	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1201	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KAWASAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1202	KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1203	BENDAHARA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1204	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1205	PENYULUH KAWASAN TRASMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1206	PEMERIKSA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1207	PENGAWAS KETRANSMIGRASIAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1208	ANALIS BAHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1209	ANALIS KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	7	1.872.000
1212	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	6	1.638.000
1213	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	6	1.638.000
1214	PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	6	1.638.000
1215	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	6	1.638.000
1216	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	5	1.321.000
1217	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	5	1.321.000
1218	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	5	1.321.000
1219	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PELAKSANA	5	1.321.000
1220	JF INSTRUKTUR AHLI MUDA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1221	JF INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1222	JF INSTRUKTUR TERAMPIL PENYELIA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.214.000
1223	JF INSTRUKTUR TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	7	1.872.000
1224	JF INSTRUKTUR TERAMPIL PELAKSANA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	6	1.638.000

1225	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1226	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1227	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL PENYELIA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.338.000
1228	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	7	2.114.000
1229	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL PELAKSANA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	6	1.911.000
1230	JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1231	JF PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1232	JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1233	JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1234	JF PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	9	2.662.000
1235	JF PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	FUNGSIONAL	8	2.433.000
1236	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1237	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1238	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI, LEMBAGA PERWAKILAN DAN PARTISIPASI POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1239	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1240	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN, PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN KONFLIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1241	BENDAHARA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1242	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1243	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1244	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1245	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1246	ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	7	1.872.000
1247	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	6	1.638.000
1248	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	6	1.638.000
1249	PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	6	1.638.000
1250	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	5	1.321.000
1251	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	5	1.321.000
1252	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PELAKSANA	5	1.321.000
1253	CAMAT	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1254	SEKRETARIS	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1255	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	9	2.859.000
1256	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1257	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000

1258	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1259	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1260	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1261	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1262	BENDAHARA	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	7	1.872.000
1263	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1264	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1265	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1266	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1267	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1268	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1269	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1270	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1271	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	6	1.638.000
1272	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1273	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1274	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1275	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1276	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	PELAKSANA	5	1.321.000
1277	CAMAT	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1278	SEKRETARIS	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1279	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	9	2.859.000
1280	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1281	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1282	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1283	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1284	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1285	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO BARU	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1286	BENDAHARA	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	7	1.872.000
1287	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	1.638.000
1288	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	1.638.000
1289	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	1.638.000
1290	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	1.638.000
1291	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	1.638.000

1292	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1293	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1294	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1295	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1296	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1297	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1298	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1299	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1300	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN KOTO BARU	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1301	CAMAT	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	12	<b>5.158.000</b>
1302	SEKRETARIS	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	11	<b>4.055.000</b>
1303	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	9	<b>2.859.000</b>
1304	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1305	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1306	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1307	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1308	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1309	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO BESAR	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1310	BENDAHARA	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1311	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1312	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1313	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1314	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1315	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1316	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1317	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1318	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1319	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1320	SEKRETARIS NAGARI	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1321	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1322	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1323	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1324	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>

1325	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN KOTO BESAR	PELAKSANA	5	1.321.000
1326	CAMAT	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1327	SEKRETARIS	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1328	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1329	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1330	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1331	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1332	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1333	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1334	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO SALAK	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1335	BENDAHARA	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	7	1.872.000
1336	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1337	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1338	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1339	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1340	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1341	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1342	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1343	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1344	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	6	1.638.000
1345	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	5	1.321.000
1346	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	5	1.321.000
1347	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	5	1.321.000
1348	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	5	1.321.000
1349	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN KOTO SALAK	PELAKSANA	5	1.321.000
1350	CAMAT	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1351	SEKRETARIS	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1352	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1353	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1354	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1355	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1356	KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1357	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1358	BENDAHARA	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	7	1.872.000

1359	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1360	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1361	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1362	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1363	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1364	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1365	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1366	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1367	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	6	1.638.000
1368	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	5	1.321.000
1369	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	5	1.321.000
1370	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	5	1.321.000
1371	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	5	1.321.000
1372	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN PADANG LAWEH	PELAKSANA	5	1.321.000
1373	CAMAT	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1374	SEKRETARIS	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1375	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	9	2.859.000
1376	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1377	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1378	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1379	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1380	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1381	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1382	BENDAHARA	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	7	1.872.000
1383	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1384	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1385	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1386	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1387	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1388	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1389	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1390	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1391	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	6	1.638.000

1392	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1393	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1394	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1395	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1396	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1397	CAMAT	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1398	SEKRETARIS	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1399	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1400	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1401	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1402	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1403	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1404	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1405	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1406	BENDAHARA	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	7	1.872.000
1407	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1408	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1409	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1410	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1411	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1412	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1413	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1414	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1415	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	6	1.638.000
1416	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	5	1.321.000
1417	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	5	1.321.000
1418	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	5	1.321.000
1419	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	5	1.321.000
1420	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	PELAKSANA	5	1.321.000
1421	CAMAT	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1422	SEKRETARIS	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1423	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	9	2.859.000
1424	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1425	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1426	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000



1427	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1428	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1429	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN SITIUNG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1430	BENDAHARA	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	7	1.872.000
1431	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1432	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1433	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1434	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1435	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1436	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1437	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1438	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1439	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1440	SEKRETARIS NAGARI	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	6	1.638.000
1441	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1442	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1443	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1444	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1445	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN SITIUNG	PELAKSANA	5	1.321.000
1446	CAMAT	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1447	SEKRETARIS	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1448	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1449	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1450	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1451	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1452	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1453	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1454	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1455	BENDAHARA	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	7	1.872.000
1456	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	1.638.000
1457	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	1.638.000
1458	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	1.638.000
1459	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	1.638.000
1460	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	1.638.000

1461	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1462	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1463	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1464	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1465	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1466	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1467	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1468	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1469	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1470	CAMAT	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	12	<b>5.158.000</b>
1471	SEKRETARIS	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	11	<b>4.055.000</b>
1472	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1473	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1474	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1475	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.509.000</b>
1476	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1477	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1478	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN TIMPEH	ADMINISTRASI	8	<b>2.262.000</b>
1479	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1480	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1481	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1482	BENDAHARA	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1483	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1484	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1485	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1486	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1487	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1488	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1489	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1490	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1491	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1492	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1493	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN TIMPEH	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>

1494	CAMAT	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	12	5.158.000
1495	SEKRETARIS	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	11	4.055.000
1496	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1497	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1498	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1499	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1500	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1501	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.262.000
1502	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KECAMATAN TIUMANG	ADMINISTRASI	8	2.509.000
1503	BENDAHARA	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	7	1.872.000
1504	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1505	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1506	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1507	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1508	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1509	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1510	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1511	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1512	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	6	1.638.000
1513	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	5	1.321.000
1514	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	5	1.321.000
1515	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	5	1.321.000
1516	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	5	1.321.000
1517	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN TIUMANG	PELAKSANA	5	1.321.000
1518	DIREKTUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	12	4.712.000
1519	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1520	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1521	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1522	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1523	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	11	3.706.000
1524	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	8	2.214.000
1525	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1526	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1527	KEPALA SEKSI PELAYANAN ASUHAN, KEPERAWATAN DAN ETIKA MUTU	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	8	2.214.000

1528	KEPALA SEKSI PELAYANAN LOGISTIK KEPERAWATAN	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1529	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1530	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1531	KEPALA SEKSI PELAPORAN, EVALUASI DAN INFORMASI	RSUD SUNGAI DAREH	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1532	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1533	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1534	PENGEMUDI AMBULAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	4	941.000
1535	PRAMU BAKTI	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	1	733.000
1536	PETUGAS KEAMANAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	3	902.000
1537	BENDAHARA	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	7	1.872.000
1538	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1539	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1540	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1541	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1542	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1543	PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1544	PETUGAS KAMAR GELAP	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	5	1.321.000
1545	PENGOLAH MAKANAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1546	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1547	PRANATA JAMUAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1548	PENGELOLA KEPERAWATAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	6	1.638.000
1549	BINATU RUMAH SAKIT	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	3	902.000
1550	PEMULASARAN JENAZAH	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	3	902.000
1551	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	7	1.872.000
1552	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	7	1.872.000
1553	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	RSUD SUNGAI DAREH	PELAKSANA	7	1.872.000
1554	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL	8	2.214.000
1555	JF DOKTER AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	12	4.957.000
1556	JF DOKTER AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	10	3.323.000
1557	JF DOKTER AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.085.000
1557,1	JF DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	12	14.085.000
1557,2	JF DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	10	12.475.000
1557,3	JF DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	12.240.000
1558	JF DOKTER GIGI AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	12	4.957.000
1559	JF DOKTER GIGI AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	10	3.226.000
1560	JF DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.692.000

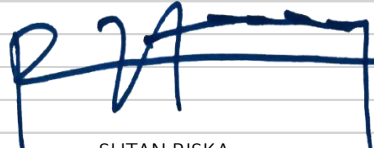
1561	JF APOTEKER AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.774.000
1562	JF APOTEKER AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.692.000
1563	JF APOTEKER AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.461.000
1564	JF PERAWAT AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.803.000
1565	JF PERAWAT AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.721.000
1566	JF PERAWAT AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.490.000
1567	JF PERAWAT TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1568	JF PERAWAT TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1569	JF PERAWAT TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1570	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1571	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1572	JF PERAWAT GIGI TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1573	JF BIDAN AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
1574	JF BIDAN AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	2.662.000
1575	JF BIDAN AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
1576	JF BIDAN TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
1577	JF BIDAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
1578	JF BIDAN TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
1579	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
1580	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
1581	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
1582	JF NUTRISIONIS AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
1583	JF NUTRISIONIS AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.055.000
1584	JF NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
1585	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
1586	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
1587	JF NUTRISIONIS TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
1588	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
1589	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
1590	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
1594	JF RADIOGRAFER TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1595	JF RADIOGRAFER TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1596	JF RADIOGRAFER TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1597	JF SANITARIAN TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.366.000
1598	JF SANITARIAN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.146.000
1599	JF SANITARIAN TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.793.000

1600	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1601	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1602	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1603	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.366.000
1604	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.146.000
1605	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.793.000
1606	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1607	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1608	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1609	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.395.000
1610	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.178.000
1611	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.828.000
1612	JF TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL PENYELIA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.338.000
1613	JF TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	7	2.114.000
1614	JF TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL PELAKSANA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	6	1.757.000
1615	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MADYA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	11	3.745.000
1616	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MUDA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	9	3.055.000
1617	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	RSUD SUNGAI DAREH	FUNGSIONAL KESEHATAN	8	2.433.000
1618	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PIMPINAN TINGGI	14	7.773.000
1619	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	12	4.712.000
1620	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1621	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1622	KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	11	3.968.000
1623	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1624	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	9	2.809.000
1625	KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	8	2.461.000
1626	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	11	3.706.000

1627	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENEGAKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
1628	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ADMINISTRASI	8	<b>2.461.000</b>
1629	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1630	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1631	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1632	BENDAHARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1633	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	5	<b>1.321.000</b>
1634	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1635	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1636	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1637	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1638	ANALIS PENYIDIKAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	7	<b>1.872.000</b>
1639	PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	3	<b>902.000</b>
1640	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1641	PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1642	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PELAKSANA	6	<b>1.638.000</b>
1643	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	FUNGSIONAL	9	<b>2.721.000</b>
1644	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	FUNGSIONAL	8	<b>2.490.000</b>

1645	JF POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL PENYELIA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	FUNGSIONAL	8	2.395.000
1646	JF POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL PELAKSANA LANJUTAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	FUNGSIONAL	7	2.178.000
1647	JF POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL PELAKSANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	FUNGSIONAL	6	1.828.000

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA



Lampiran III : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 1 TAHUN 2021

Tanggal : 26 Februari 2021

Tentang : Peraturan Bupati Tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Format Pengurangan TPP berdasarkan pelanggaran jam kerja

1. Pengurangan TPP berdasarkan Terlambat Masuk Kerja

Nama :  
 Nip :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan/pekerjaan :  
 Instansi/OPD/Bagian/Bidang :

No	Keterlambatan (TL)	Waktu Masuk Bekerja Terlambat	Jumlah Hari (TL)	Persentase Pengurangan TPP	Total Pengurangan
1	TL 1	07.31 s.d.< 08.01	-	0,5%	-
2	TL 2	08.01 s.d.< 09.31	-	1%	-
3	TL 3	09.31 s.d.<10.01	-	1,25%	-
4	TL 4	≥ 10.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	-	1,5%	-

Pulau Punjung, .....

Diketahui Oleh:

Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang

Atasan Langsung

Nama

Nama

Nip.

Nip.

2. Pengurangan TPP berdasarkan Waktu Pulang Kerja Sebelum Jam Pulang Kerja.

Nama :  
 Nip :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan/Pekerjaan :  
 Instansi/SKPD/Bagian/Bidang :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Waktu Pulang Bekerja			Persentase Pengurangan TPP	Jumlah Persentase Pengurangan
	Hari	Bagi yang tidak memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan	Jml Hari Keterlambatan		
PSW 1	Senin- Kamis	15.31 s.d.< 16.00	-	0,5%	-
PSW 2	Jumat	16.01 s.d.< 16.30	-	0,5%	-
PSW 3	Senin- Kamis	15.01 s.d.< 15.31	-	1%	-
PSW 4	Jumat	15.31 s.d.< 16.01	-	1%	-
PSW 5	Senin- Kamis	14.31 s.d.< 15.01	-	1,25%	-
PSW 6	Jumat	15.01 s.d.< 15.31	-	1,25%	-
PSW 7	Senin- Kamis	< 14.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	-	1,5%	-
PSW 8	Jumat	< 15.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	-	1,5%	-

Pulau Punjung, .....

Diketahui Oleh:

Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bidang

Atasan Langsung

Nama

Nama

Nip.

Nip.

3. Pengurangan TPP Berdasarkan Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan/Pekerjaan :  
 Instansi/SKPD/Bagian/Bidang :

No	Uraian	Jumlah Hari Tanpa Keterangan	Persentase Pengurangan TPP	Total Pengurangan
1	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	0	3%	0

Pulau Punjung, .....

Diketahui Oleh:  
 Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala  
 Bagian/Kepala Bidang

Atasan Langsung

NAMA  
 NIP.

NAMA  
 NIP.

4. PTPP Berdasarkan Tidak Masuk Kerja Dengan Keterangan

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan/Pekerjaan :  
 Instansi/SKPD/Bagian/Bidang :

No	Uraian	Jumlah Hari Tanpa Keterangan	Persentase Pengurangan TPP	Total Pengurangan
1	Tidak Masuk Kerja Dengan Keterangan	0	1,5%	0

Pulau Punjung, .....

Diketahui Oleh:  
 Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala  
 Bidang

Atasan Langsung

NAMA  
 NIP.

NAMA  
 NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(Kepala OPD/Unit Kerja)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi e-SKP.online yang merupakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung kerugian tersebut.

....., .....

Kepala OPD

.....  
.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Manajemen Kinerja
3. Peninggal

Format pengurangan cuti

Nama :  
Nip :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Instansi/SKPD/Bagian/Bidang :

No	Uraian	Persentase Pengurangan ITPP	Besaran ITPP	Total Pengurangan
1	Cuti alasan penting	40%		
2	Cuti persalinan pertama dan kedua	40%		
3	Cuti persalinan ketiga dan keempat	60%		
4	Cuti sakit pada hari ke 4 s/d hari ke 14	25%		
5	Cuti sakit pada hari ke 15 s/d hari ke 22	40%		
6	Cuti sakit pada bulan kedua	60%		
7	Cuti sakit pada bulan ketiga sampai bulan keenam	80%		

Pulau Punjung,

.....

Diketahui Oleh:  
Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala  
Bagian/Kepala Bidang

Atasan Langsung

Nama  
Nip.

Nama  
Nip.

### DAFTAR HADIR MANUAL

HARI :  
 TANGGAL :  
 UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETERANGAN															
				A	H	T 1	T 2	PC	CM	CS	CA	CB	CD	CT	I	S	DL	TB	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

\*) ceklis salah satu keterangan

Ket :

- A : Alpa
- H : Hadir
- T1 : Terlambat 0-15 Menit
- T2 : Terlambat diatas 15 Menit
- PC : Pulang Cepat
- CM : Cuti Melahirkan
- CS : Cuti Sakit
- CA : Cuti Alasan Penting
- CB : Cuti Besar
- CD : Cuti Diluar Tanggungan Negara
- CT : Cuti Tahunan
- I : Izin
- S : Sakit
- DL : Dinas Luar
- TB : Tugas Belajar

Kepala OPD

Nama  
 Pangkat  
 NIP.

## LEMBARAN PENILAIAN SASARAN KERJA BULANAN

NAMA : .....  
 NIP : .....  
 PANGKAT/GOLONGAN : .....  
 JABATAN/PEKERJAAN : .....  
 INTANSI/OPD : .....

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP 5 HARI KERJA			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Menjalankan tugas setiap hari kerja	35%	≥20 HK	19-18 HK	17-16 HK	≤15 HK
			35	30	25	20
	Hasil penilaian (1)					
	2. Meyelesaikan tugas sesuai waktu yg ditentukan	25%	Tepat waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
			25	18,75	12,5	6,25
	Hasil penilaian (2)					
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)					
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran kinerja pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	>65-50
			25	18	12,5	6,25
	Hasil penilaian (1)					
	2. Prilaku kerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	>65-50
			15	11,25	7,5	3,75
	Hasil penilaian (2)					
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2)					
	SUB PENILAIAN (I+II)					

Diketahui :  
 Sekretaris/Kabag/Kabid....

Pulau Punjung, .....

Atasan Lansung.....

Nama  
 Pangkat  
 NIP

Nama  
 Pangkat  
 NIP

## Format Surat Keterangan dan Permohonan Izin

### 1. Surat Keterangan Atasan Langsung

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG  
BAGI PEGAWAI ASN YANG TIDAK BERADA DITEMPAT DENGAN ALASAN YANG SAH  
NOMOR .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan : (jabatan atasan langsung)  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pejabat/pegawai di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Padahari ..... tanggal ..... benar-benar hadir pada jam kerja dan pulang pukul .....  
Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari, isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerangkan

.....

NIP. ....

Keterangan:

1. untuk pegawai pelaksana yang lupa absen pulang kantor, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon IV berkenaan;
2. untuk pejabat eselon IV yang lupa absen pulang kantor, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon III berkenaan;
3. untuk pejabat eselon III yang lupa absen pulang kantor, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon II berkenaan.

## 2. Surat Permohonan Izin

### PERMOHONAN IZIN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja\*) selama ..... hari/jam/menit\*), pada hari ..... tanggal..... dengan alasan, yaitu .....

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/TidakMenyetujui  
).....(Pejabat yang berwenang\*\*) )

Hormat Kami

.....

.....

NIP. ....

NIP. ....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan .....

---

## 3. Surat Izin Keluar Kantor Pada Jam Kerja

### SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA

Yang bertandatangan di bawahini, memberikan izin kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk melakukan keperluan pribadi, yaitu: .....(sebutkan nama keperluannya) pada jam kerja, yaitu pada pukul ..... sampai dengan pukul.....

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(jabatan atasan langsung)

.....

NIP.



DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SKPD : .....

Bulan : .....


NO	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PERHITUNGAN TPP																								
					CUTI	Tidak masuk kerja dgn ket	Tidak masuk kerja tanpa ket	Terlambat Masuk Kerja					Waktu Pulang Kerja Sebelum Jam Pulang Kerja.								PSKB			TOTAL PTPP	BESARAN ITPP	JUMLAH TPP (JUMLAH BRUTO)	PPh	JUMLAH NETTO	
								TL. 1	TL. 2	TL. 3	TL. 4	NILAI	PSW. 1	PSW. 2	PSW. 3	PSW. 4	PSW. 5	PSW. 6	PSW. 7	PSW. 8	NILAI	II.1	II.2						NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9 + 10 + 11 + 12)	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	23	24	25 = (23+24)	26 = (25 - 7 - 8 - 13 - 22)	27	28 = (26*27/100) - cuti	29 = (28 * Gol III 5%, Gol IV 15%)	30 = (28 - 29)
1	-	-			-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2																													

Keterangan

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolom nomor 1 s/d 5 data pegawai</li> <li>2. Kolom nomor 6 penjumlahan dari total cuti</li> <li>3. Kolom nomor 7 penjumlahan dari total tidak masuk kerja dengan keterangan</li> <li>4. Kolom nomor 8 penjumlahan dari total tidak masuk kerja tanpa keterangan</li> <li>5. Kolom nomor 9 TL.1 penjumlahan dari total terlambat sampai dengan 30 menit</li> <li>6. Kolom nomor 10 TL.2 penjumlahan dari total terlambat sampai dengan 60 menit</li> <li>7. Kolom nomor 11 TL.3 penjumlahan dari total terlambat sampai dengan 90 menit</li> <li>8. Kolom nomor 12 TL.4 penjumlahan dari total terlambat lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir</li> <li>9. Kolom nomor 13 penjumlahan dari kolom nomor 9+10+11+12</li> <li>10. Kolom nomor 14 s/d 21 pulang sebelum jam kerja</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kolom nomor 22 penjumlahan dari kolom nomor 14+15+16+17+18+19+20+21</li> <li>12. Kolom nomor 23 II.1 Disiplin</li> <li>13. Kolom nomor 24 II.2 Prestasi Kerja Pegawai</li> <li>14. Kolom nomor 25 penjumlahan dari kolom nomor 23+24</li> <li>15. Kolom nomor 26 pengurangan dari kolom 25-7-8-13-22</li> <li>16. Kolom nomor 27 besaran ITPP</li> <li>17. Kolom nomor 28 perkalian antara nomor 26 dengan 27 dibagi 100 lalu hasil tersebut dikurangi dengan cuti nomor 6</li> <li>18. Kolom nomor 29 perkalian jumlah bruto dengan nilai pajak penghasilan (golongan III pajaknya 5% dan golongan IV pajaknya 15%)</li> <li>19. Kolom nomor 30 pengurangan antara nomor 28 dengan 29</li> </ol> |
|---|--|

.....  
Kepala Perangkat Daerah

Nama.....  
NIP.....

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA

